

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Rabu, 13 April 2022



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media online dan media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas.com	Rabu, 13 April 2022	Berantas Kemiskinan Esktrem di Indonesia, Ini Langkah Kementerian PUPR	<p>Demi mewujudkan Indonesia tanpa kemiskinan esktrm, di tahun 2022 akan ada 212 kabupaten/kota di 25 provinsi yang akan dibenahi oleh pemerintah. Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja (Raker) bersama dengan Komisi V DPR RI, Selasa (12/4/2022) menyampaikan pihaknya telah menyiapkan beberapa program perencanaan terpadu untuk menangani masalah tersebut.</p> <p>https://www.kompas.com/properti/read/2022/04/12/194737221/berantas-kemiskinan-esktrem-di-indonesia-ini-langkah-kementerian-pupr.</p>
2	Kompas.com	Rabu, 13 April 2022	Pasca-gempa Pemerintah Rekonstruksi Infrastruktur Sulbar, Tuntaskan Sederet	<p>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan, ada 158 kegiatan penanganan pasca-gempa di Sulawesi Barat (Sulbar) yang ditangani. "Dengan progres 65 persen selesai, 34 persen on-going (berjalan), dan 1 persen persiapan," jelas Basuki.</p> <p>https://www.kompas.com/properti/read/2022/04/12/183000321/pasca-gempa-sulbar-pemerintah-tuntaskan-rekonstruksi-sederet.</p>
3	Kontan.co.id	Rabu, 13 April 2022	Webinar Peringatan Hari Air Dunia, Menteri Basuki : Optimalisasi Air Tanah Harus Mengacu pada Prinsip Save Yield	<p>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong seluruh stake holder untuk terus meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya air tanah dengan mengedepankan pendekatan secara saintifik (scientific). Hal tersebut disampaikan Menteri Basuki saat membuka acara Webinar Nasional dengan topik 'Optimalisasi Air Tanah Untuk Semua' di Jakarta, Selasa (12/4/2022).</p> <p>https://mitrapol.com/2022/04/12/webinar-peringatan-hari-air-dunia-menteri-basuki-optimalisasi-air-tanah-harus-mengacu-pada-prinsip-save-yield/</p> <p>https://www.inilah.com/menteri-basuki-optimalisasi-air-tanah-harus-mengacu-pada-prinsip-save-yield</p>

Judul	Kemiskinan Ekstrem Dituntaskan pada 2024	Tanggal	13 April 2022
Media	Kompas, Halaman 10		
Resume	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2022), menyatakan, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024 melalui koordinasi lintas kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).		

Kemiskinan Ekstrem Dituntaskan pada 2024

Pemerintah menargetkan dapat mengatasi kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Sejumlah anggota Komisi V DPR RI berharap data acuan akurat sehingga program tidak salah sasaran.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menargetkan dapat mengatasi sepenuhnya kemiskinan ekstrem di Indonesia tahun 2024. Terkait hal itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan penanganan di 212 kabupaten/kota pada tahun 2022.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2022), menyatakan, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024 melalui koordinasi lintas kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Tahun lalu, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia tercatat 4 persen dari jumlah ke-

luarga Indonesia. Tahun ini, pemerintah mencanangkan penanganan kemiskinan ekstrem diprioritaskan pada 212 kabupaten/kota dengan menyasar total 22.386.202 keluarga.

Penanganan Kementerian PUPR antara lain berupa dukungan infrastruktur, seperti program infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) dan program penyediaan perumahan. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diarahkan untuk menangani kemiskinan ekstrem.

Pada setiap kabupaten/kota akan dipilih lima kecamatan dan dua desa serta dua rukun tetangga/rukun warga (RT/RW) yang tidak memiliki rumah layak huni terbanyak sebagai lokus prioritas. "Saat ini sedang dilakukan pendalaman atas kesiapan lokasi pelaksanaan dan jenis penanganan yang pelaksanaan fisiknya akan dimulai Juni 2022," ujarnya.

Basuki menambahkan, data

BKKBN menjadi basis dalam penetapan lokus kawasan dengan kemiskinan ekstrem dan rekapitulasi jumlah keluarga dengan indikator, antara lain fasilitas lingkungan tidak sehat, keluarga tidak memiliki sumber air minum utama yang layak, tidak mempunyai jamban layak, serta rumah tidak layak huni.

Kemiskinan ekstrem merujuk pada masyarakat berpenghasilan setara dan di bawah 1,9 dollar AS per kapita per hari. Kriteria lain untuk menetapkan kemiskinan ekstrem mencakup prevalensi tengkes tinggi, kelengkapan sanitasi rendah, keluarga tak memiliki sumber air minum utama yang layak, tidak punya jamban layak, rumah tidak layak huni, serta termasuk dalam target penanganan kawasan kumuh 2020-2022.

Penanganan kemiskinan ekstrem dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni prioritas pada 35 kabupaten di 7 provinsi pada tahun 2021, 212 kabupaten/ko-

ta di 25 provinsi pada tahun 2022, dan 514 kabupaten/kota di 34 provinsi pada tahun 2023-2024. Program IBM yang disiapkan meliputi penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas), sanitasi berbasis masyarakat (sanimas), pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (pisew), dan kota tanpa kumuh (kotaku).

Program BSPS

Adapun program BSPS merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan kualitas rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum. Penerima BSPS adalah MBR yang memiliki tanah, belum memiliki rumah, dan berpenghasilan maksimal sebesar upah minimum provinsi.

Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Gerindra, Sudewo, mengemukakan, kemiskinan ekstrem perlu diperjelas di tingkat

kecamatan, kelurahan, RT, atau RW. Hal itu diperlukan agar program tepat sasaran. Sudewo menilai data yang dipakai Kementerian PUPR dari BKKBN kerap tidak sesuai realitas. "Kalau data ini dipakai sebagai acuan akan menjadi preseden buruk. Timbul kecemburuan karena warga yang seharusnya tidak mendapatkan (bantuan) justru mendapatkan," ujarnya.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan perlu prosedur standar operasi terkait mekanisme penentuan penerima bantuan program PUPR. "Ini mengingat kondisi di masyarakat yang terus mengalami perubahan," katanya.

Basuki mengemukakan, pihaknya sejauh ini melakukan verifikasi data BKKBN, melalui kerja sama dengan BKKBN dan Kemenko PMK. Program penanganan kemiskinan ekstrem dilaksanakan setelah melalui verifikasi data. (LKT)